
Efektivitas Kebijakan Pemantauan Harga Komoditas Strategis Di Pasar Sememi Oleh Dinas Koperasi,Ukm, Perdagangan Surabaya

Muhammad Akshay Raihan Fahrozi¹, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: 23041010130@student.upnjatim.ac.id, rosyida.adne@upnjatim.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Price monitoring in the market is one of the government's efforts to maintain price stability and protect the interests of traders and the community. This is carried out by the Surabaya City Cooperative, Small and Medium Enterprises, and Trade Office through the policy of Surabaya Mayor Regulation No. 83 of 2021. This study aims to assess the effectiveness of the strategic commodity price monitoring policy at Sememi Market implemented by the Surabaya City Cooperative, Small and Medium Enterprises, and Trade Office in maintaining price stability and providing tangible benefits for traders and the community. This study uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews, observations, and documentation involving price monitoring officers and market traders as informants. The analysis is based on policy evaluation theory that emphasizes five criteria: efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The findings show that implementation is still uneven. The government tends to respond more quickly to price increases for certain commodities, such as cooking oil, while other commodities, especially vegetables with highly volatile prices, receive less policy response. Therefore, it is necessary to improve policies to ensure a more balanced government response across all strategic commodities in order to achieve optimal price stability.

Keywords: Policy Effectiveness, Price Monitoring, Price Stability, Sememi Market

ABSTRAK

Pemantauan harga di pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan pedagang serta masyarakat. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemantauan harga komoditas strategis di Pasar Sememi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemantauan harga dan pedagang pasar sebagai informan. Analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang menekankan lima kriteria: efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak merata. Pemerintah cenderung merespons lebih cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak goreng, sementara komoditas lain, terutama sayuran dengan harga yang sangat fluktuatif, mendapatkan respons kebijakan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kebijakan untuk memastikan respons pemerintah yang lebih seimbang di semua komoditas strategis guna mencapai stabilitas harga yang optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pemantauan Harga, Stabilitas Harga, Pasar Sememi.

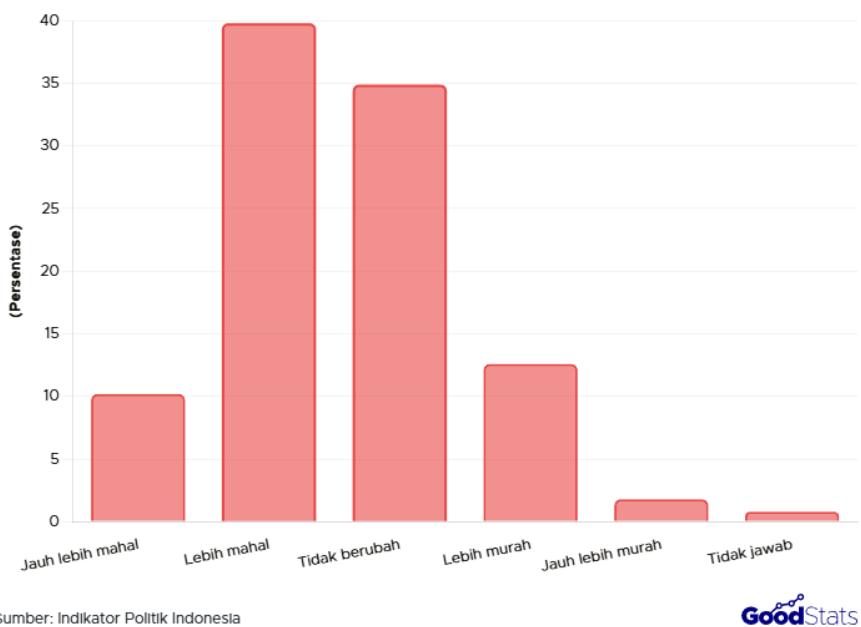
PENDAHULUAN

Salah satu komponen utama pasar, yang berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, harga berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai barang atau jasa serta menjadi sinyal bagi para pelaku pasar untuk membuat keputusan tentang produksi dan konsumsi. Menurut sebuah penelitian (Isra et al., 2025) Fluktuasi harga memberikan dampak yang cukup besar, baik bagi pedagang maupun konsumen. Pedagang menghadapi ketidakpastian dalam menentukan Harga jual, terutama saat harga dari pemasok berubah secara tiba-tiba. Hal ini dapat menyebabkan penurunan keuntungan bahkan kerugian jika barang yang sudah dibeli tidak terjual sesuai ekspektasi. Sementara itu, konsumen merasakan langsung beban kenaikan harga dengan menurunkan jumlah pembelian atau memilih bahan pangan alternatif yang lebih murah. Ketersediaan pangan juga merupakan faktor penting yang memengaruhi harga pangan strategis di Indonesia.

Stabilitas harga tidak hanya mencerminkan keseimbangan pasar, tetapi juga menjadi indikator penting kesejahteraan sosial. Ketika harga pangan terkendali, daya beli masyarakat lebih terjaga, sementara gejolak harga yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan keresahan publik, inflasi, bahkan krisis sosial ekonomi. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif bidang perdagangan, terutama di daerah, sangat diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang pokok sekaligus menekan dampak fluktuasi pasar (Kuncoro & Nafisa, 2025). Menurut (Ali Wardana et al., 2025.) tingkat kesejahteraan seseorang dapat dipengaruhi secara langsung oleh perubahan harga pangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, yang lebih rentan terhadap gejolak ekonomi.

Naiknya harga bahan pokok bisa berakibat pada kesejahteraan masyarakat rumah tangga yang sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, akan tetapi setelah langkahnya bahan-bahan pokok masyarakat mulai membatasinya. Hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga. Dimana juga masyarakat harus lebih mengutamakan kebutuhan primer yang berperan dalam kehidupan sehari-hari dan harus mengesampingkan kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini adalah salah satu suatu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat (Andriani et al., 2020).

Ketersediaan pangan juga merupakan faktor penting yang memengaruhi harga pangan strategis di Indonesia. Tingginya ketersediaan pangan strategis dapat menurunkan harga, sementara ketersediaan yang rendah akan meningkatkan harga. Ini menyebabkan pergerakan juga harga dapat yang cenderung naik, yang jika berlangsung lama, dapat menyebabkan inflasi (Marina et al., 2024). Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya permintaan menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional, terganggunya distribusi akibat kondisi cuaca dan logistik, praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta lemahnya pengawasan pasar dari aparat pemerintah daerah (Subhi et al., 2025).



Gambar 1. Pandangan Harga Kebutuhan Pokok 2024 dan 2025

Dikutip dari datagoodstats.id (Izzul Wafa, 2025) survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, sekitar 50% orang menganggap harga kebutuhan pokok saat ini lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya. Secara khusus, 39,8% responden mengatakan harga menjadi lebih mahal, 10,2% mengatakan harga menjadi jauh lebih mahal. Sementara itu, 34,9% menganggap harga tetap stabil, 12,6% menganggap harga lebih murah, dan 1,8% mengatakan harga menjadi jauh lebih murah. Permintaan kebutuhan pokok biasanya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri, itulah sebabnya survei ini dilakukan. Dengan memperkuat pasokan di pasaran, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan terus mengawasi dan mengontrol harga. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengalami kenaikan harga bahan pokok, sehingga evaluasi keberhasilan kebijakan stabilisasi harga pemerintah sangat penting.

(Pemerintah Kota Surabaya, 2025) menyatakan bahwa perekonomian kota Surabaya tumbuh sebesar 5,24% pada kuartal II tahun 2025, dengan pasar tradisional menjadi salah satu kontributor utama salah satunya yaitu Pasar Sememi. Beberapa pasar tradisional dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, dan salah satu pasar yang berada di bawah pengawasan dinas tersebut adalah Pasar Sememi. Kebijakan revitalisasi dan pengembangan pasar, termasuk upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang, mencerminkan bahwa Dinkopumdag dan Pemerintah kota menghargai pasar tradisional sebagai inti dari ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pemerintah melalui dinas memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan harga komoditas strategis secara berkala guna mencegah terjadinya fluktuasi harga di pasar, yang salah satunya ada pada Pasar Sememi yang ada di

daerah Kota Surabaya. Pasar Sememi merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya. Pasar ini memainkan peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi konsumen dan pedagang kecil di bagian barat Surabaya. Setiap tiga hari sekali dalam satu minggu, Dinkopumdag memantau harga komoditas strategis di Pasar Sememi sebagai bagian dari kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang fungsi Dinas Perdagangan tertulis pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga pemantauan/pengawasan harga. Pasar ini juga sering mengadakan pasar murah untuk mencegah kenaikan harga.

Kegiatan pemantauan harga yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan data harga secara berkala, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap mekanisme distribusi serta perilaku harga yang ditetapkan oleh para pedagang (Ali Wardana et al., 2025). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis efektivitas kebijakan pada Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021 mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga pemantauan/pengawasan harga yang ada di Pasar Sememi Surabaya oleh Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang terdiri dari 5 kriteria yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan (Putri & Purnamasari, 2025). Melalui penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemantauan harga di Pasar Sememi efektif dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis serta memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat.

METODE

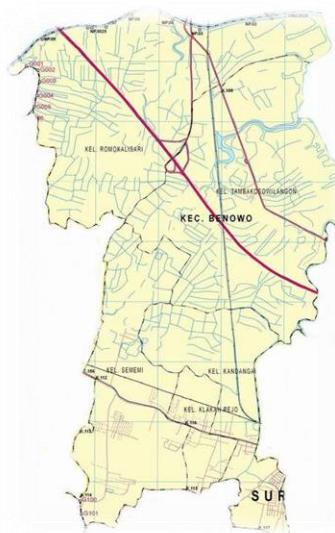
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggambarkan efektifitas kebijakan pada Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021 (Nur et al., 2025). Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia (Nurrissa & Hermina, 2025). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara lebih rinci dengan memadukan dengan teori evaluasi kebijakan William N Dunn yang terdiri dari 5 kriteria yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan untuk melihat efektifitas kebijakan yang diterapkan di lapangan khususnya pada lokasi penelitian yaitu di Pasar Sememi Surabaya, lalu bagaimana orang-orang yang menjadi sasaran merasakan dampaknya, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Putri & Purnamasari, 2025). Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Sememi Surabaya tepatnya untuk warga disekitar wilayah Surabaya Barat khususnya daerah Sememi. Data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian data yang dikumpulkan untuk melakukan sebuah penelitian yaitu observasi dengan diikuti wawancara, dan dokumentasi pada saat di lapangan. Sumber data pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian kualitatif ini, sumber data utamanya berasal dari jawaban

yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara, kegiatan magang lapangan dilaksanakan selama lima bulan, terhitung mulai tanggal 18 Agustus hingga 18 Desember dan dokumentasi sebagai data tambahan. Penelitian ini menggunakan teknik informan purposive sampling, yakni metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Alvie Kusnarti et al., 2025).

Analisis data dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai proses memeriksa dan memahami data untuk mendapatkan temuan, makna, dan interpretasi tertentu dari data yang dikumpulkan (Aisyah Sekar Sari et al., 2025). Peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman dalam (Nur et al., 2025) bahwa kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan saling terkait antara pengumpulan data, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data yaitu peneliti mengambil data dari lapangan melalui observasi di lapangan, wawancara dengan informan, dan melakukan dokumentasi. Kondensasi data untuk penelitian ini bertujuan untuk menjadi pembagian data yang telah dikumpulkan menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, penyajian data adalah berperan sebagai informasi perbandingan hasil observasi dan wawancara antara informan satu dengan yang lainnya sehingga mudah dipahami. Terakhir pada bagian penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada analisis data yang dimana melakukan sebuah verifikasi data sesuai dengan hasil penelitian tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemantauan harga di Pasar Sememi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari pihak internal dinas (pegawai atau pengelola) serta para pedagang. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sememi yang tepatnya ada pada pada kecamatan Benowo Surabaya Barat.



Gambar 2. Peta Kecamatran Benowo Surabaya Barat (Lokanesia, 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan para pedagang dari Pasar Sememi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan harga di Pasar Sememi dilakukan secara berkala oleh kami dari bidang perdagangan. Setiap pagi, kami mendatangi pedagang untuk mendata harga jual setiap komoditas strategis untuk hari senin, rabu, dan jumat pada pukul 7-10 Pagi. Data yang diperoleh kemudian dilaporkan dan direkap di kantor dinas tepatnya di siola untuk dianalisis lebih lanjut. Secara umum, proses pemantauan telah berjalan efektif, ditandai dengan adanya koordinasi pengelola pasar, dan pihak dinas. Laporan harga disampaikan secara teratur dan menjadi bagian dari sistem pemantauan harga pokok Kota Surabaya.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal karena masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti sikap pedagang yang kurang kooperatif sehingga banyak pedagang di Pasar Sememi tidak menyadari bahwa kegiatan pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Surabaya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis di pasar, bukan untuk membatasi jual beli. Hasil *interview* yang telah dilakukan oleh penulis dari Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan untuk melakukan wawancara dengan pedagang di pasar Sememi mengenai kebijakan pemantauan harga komoditas strategis. Penelitian ini mewawancara pedagang komoditas strategis di pasar sememi, seperti pedagang sayur, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya. Penulis juga mewawancara staf lapangan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Surabaya yang menangani pemantauan harga. Berikut untuk uraian profil informan tersebut :

1. Nama Informan : Mbah Solikah

Status : Pedagang

Mbah Solikah telah berjualan di Pasar Sememi Surabaya sejak awal tahun 1990-an. Beliau menjadi salah satu orang yang cukup dikenal oleh para pedagang dan pembeli karena pengalamannya yang panjang dalam menjalankan bisnis di pasar tersebut, dengan usia 72 tahun.

2. Nama Informan : Bu Sumiati

Status : Pedagang

Bu Sumiati, seorang pedagang berusia 63 tahun, telah menjadi bagian dari Pasar Sememi sejak 2015. Ia adalah salah satu pedagang selain Mbah Solikah yang telah menyaksikan secara langsung perkembangan pasar sejak awal berdirinya hingga kondisinya saat ini. Pasar Sememi awalnya dibangun oleh individu dan digunakan oleh warga sekitar untuk berjualan sebelum dimiliki oleh pemerintah. Setelah itu, pasar diambil alih oleh pemerintah dan dibangun ulang untuk menjadi lebih terorganisir dan layak untuk aktivitas perdagangan.

Hasil wawancara mendalam dengan pedagang sayur di Pasar Sememi yaitu Mbah Solikah, menunjukkan bagaimana pasokan dan kualitas barang yang dijual sangat memengaruhi harga komoditas, terutama sayur mayur. Mbah Solikah menjelaskan bahwa harga di pasar selalu berfluktuasi dan tidak pernah benar-benar stabil. Hal ini terutama karena sayur mayur merupakan komoditas yang mudah

rusak, sehingga hasil panen petani sangat memengaruhi ketersediaannya. Harga akan naik ketika pasokan berkurang, dan harga akan turun ketika pasokan melimpah.

"...pasar itu gabisa kalo ga naik turun pasti ngalamin harga itu naik turun, sayur itu cepet busuk beda kaya sembako yang awetnya bisa berhari hari kalo sayur kan cepat busuk otomatis dari harganya ya naik turun tergantung dari petaninya"(Hasil Wawancara 14 November 2025).

Selain menjelaskan fluktuasi harga yang tidak menentu, Mbah Solikah juga membahas kegiatan pemantauan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemantauan harga tidak menjadi masalah jika dilakukan dengan jujur dan transparan sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan hasil pemantauan tersebut guna mencegah pedagang merasa dirugikan.

"...gapapalo kalau mantau mantau harga asalkan sesungguhnya dan dari sananya tidak bohong selama pemerintah pemerintah terbuka"(Hasil Wawancara 14 November 2025).

Mbah Solikah menambahkan bahwa perubahan cuaca dan kondisi pasokan memiliki dampak yang signifikan terhadap fluktuasi harga. Mbah Solikah menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan masyarakat Surabaya tetap tinggi, pasokan dari petani seringkali menurun selama musim hujan. Situasi ini menyebabkan harga komoditas, terutama sayur yang meningkat.

"...masalah harga itu naik turun nak apalagi seperti ini hujan, terus dari petani gaada, surabaya banyak yg membutuhkan jadi barang ikut mahal, jadi pemantauan juga butuh dilakukan"(Hasil Wawancara 14 November 2025).

Di sisi lain, Bu Sumiati salah satu pedagang di Pasar Sememi menjelaskan bahwa petugas pemantauan harga tidak berdampak negatif terhadap aktivitas penjualan mereka. Begitu pembeli sudah melakukan transaksi, petugas pemantauan biasanya akan menunggu pedagang menyelesaikan proses penjualan hingga tuntas sebelum memulai langkah berikutnya dalam proses pendataan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pedagang dan petugas cukup positif dan konsisten. Sikap petugas yang sesuai dengan situasi di lapangan membuat pedagang merasa nyaman, dan hal ini juga memperkuat kegiatan pemantauan harga yang dilakukan oleh pemerintah.

"...enggasih, orang orang beli aku layanin dulu terus selanjutnya baru kamu biasanya kan gtu"(Hasil Wawancara 14 November 2025).

Bu Sumiati menegaskan bahwa respons pemerintah terhadap masalah harga sangat cepat. Bu Sumiati menjelaskan bahwa sempet ada kemarin di pasar sememi kedatangan Menteri Perdagangan mendistribusikan stok minyak goreng kepada pedagang di pasar dan melakukan pemetaan terhadap Pasar Sememi. Beliau menegaskan bahwa pemerintah langsung mengganti barang, pedagang tidak perlu menggunakan modal tambahan, yang berdampak negatif pada penurunan harga. Situasi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk penyediaan stok sangat membantu dalam menstabilkan harga sekaligus meringankan beban pedagang.

"...Untuk respon dari pemerintah cepet dan sempat ada menteri perdagangan dateng ke pasar ngasih stok untuk minyak kita dan otomatis harga turun dikarenakan langsung

dikasih pemerintah. Kalau dari pemerintah enak ada yang suplai jadi dari sini ga keluar modal" (Hasil Wawancara 14 November 2025).

Bu Sumiati juga menambahkan bahwa harga pasar saat ini mulai menunjukkan penurunan yang sedikit. Dia menjelaskan bahwa beberapa komoditas hanya turun sekitar dua ribu rupiah, sehingga perubahan harga tersebut tidak akan signifikan bagi para pedagang dan pembeli. Meskipun demikian, dia percaya bahwa pemantauan harga bermanfaat karena dapat membantu memastikan bahwa harga tidak menjadi terlalu fluktuatif yang menyebabkan harga naik lebih cepat, dan mencegah lonjakan secara tiba tiba.

"...jelasih, tapi sekarang udah mulai merangkak turun tapi ga banyak ada yang turun 2rb jadi ga banyak, terus ada manfaatnya juga biar ga harganya juga ga njomplang (Naik/Turun)" (Hasil Wawancara 14 November 2025).



Gambar 3. Survey dan Pelaksanaan Pemantauan Harga



Gambar 4. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Periode Oktober 2025

(Kementerian Perdagangan, 2025) mengungkapkan bahwa infografis dari Kementerian Perdagangan menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan

pokok nasional hingga Oktober 2025, termasuk data inflasi bulanan dan tahunan, serta harga rata-rata komoditas seperti daging, minyak goreng, cabai, bawang, beras, gula, dan bawang. Grafik inflasi menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama pada kategori sayuran yang tidak stabil, yang sangat dipengaruhi oleh masalah pasokan, tren musiman, dan cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan bahan pokok yang memiliki masa simpan lebih lama, dan pasokan yang lebih stabil. Data tersebut berkaitan kebijakan pemantauan harga karena, meskipun pemerintah melakukan pemantauan rutin, pemantauan saja tidak cukup untuk menghentikan kenaikan harga komoditas yang sensitif terhadap kondisi produksi dan iklim.

Pembahasan berikut ini merupakan hasil dari wawancara mendalam yang dilaksanakan di Pasar Sememi, Surabaya, menggunakan teknik yang didasarkan pada informasi dan didukung oleh observasi serta dokumentasi. Semua data dikumpulkan untuk mengatasi masalah dan fokus penelitian pada efektivitas kebijakan penetapan harga komoditas strategis yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021, yang mengatur fungsi dari Dinas Perdagangan termasuk pengumpulan, distribusi, pemantauan, dan evaluasi informasi pasar, serta stabilisasi harga melalui pemeliharaan harga atau penyesuaian harga. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn dalam (Putri & Purnamasari, 2025) untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut, yang mencakup lima kriteria yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan kriteria yang tercantum.

1. Efisiensi

Melalui data wawancara dari kedua pedagang, prosedur pemantauan harga di Pasar Sememi dapat dianggap efektif. Petugas yang bertugas memantau harga bertindak dengan cepat, tidak menghalangi transaksi, dan tidak menimbulkan hambatan lain bagi pedagang. Petugas tidak mencatat harga hingga para pedagang menyelesaikan transaksi mereka. Meskipun dilakukan pemantauan rutin, fluktuasi harga tetap terjadi, terutama pada komoditas sayuran, yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan hasil panen petani. Ketika ketersediaan menurun, terutama selama musim hujan, komoditas seperti cabai, bawang, dan berbagai jenis sayuran sering mengalami kenaikan harga. Pemantauan yang telah dilakukan belum cukup untuk menghentikan fluktuasi harga di lapangan.

Dampak terhadap pedagang atau konsumen biasanya tertunda karena waktu dan cara pelaksanaan kebijakan (termasuk pemantauan harga) yang artinya seringkali terdapat keterlambatan antara tindakan pemerintah dan dampaknya di lapangan dalam hal inisiatif pengendalian harga, terutama pemantauan harga (Desi Aryani, 2021). Hal ini berarti meskipun data harga telah dikumpulkan, diperlukan waktu untuk menganalisis, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan seperti distribusi stok atau operasi pasar.

2. Kecukupan

Informasi harga yang dikumpulkan secara rutin membantu pemerintah memahami kondisi pasar secara lebih akurat, sementara pedagang merasa terbantu

karena adanya transparansi harga yang lebih jelas. Ini membuat informasi harga lebih transparan dan dipantau secara ketat, kebijakan pemantauan harga membantu baik pemerintah maupun pedagang. Pedagang setuju bahwa sangat diuntungkan oleh tindakan pemerintah, seperti penyediaan minyak goreng saat harga naik. Pemantauan harga masih belum cukup untuk menghentikan kenaikan harga barang yang sangat bergantung pada cuaca dan berbeda dengan stok sembako yang memiliki ketahanan yang cukup lama. Oleh karena itu, kebijakan ini cukup bermanfaat, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah utama fluktuasi harga.

3. Perataan

Konsep perataan belum sepenuhnya dirasakan secara merata dalam hal dampaknya. Dibandingkan dengan pedagang yang menjual barang stabil seperti minyak goreng atau bahan pokok, pedagang yang menjual komoditas mudah busuk seperti sayuran mengalami fluktuasi harga yang lebih tinggi. Meskipun kebijakan diterapkan secara merata, manfaat yang diperoleh pedagang berbeda dan tergantung pada jenis komoditas yang dijual.

4. Responsivitas

Seperti yang terlihat dari peran cepat pemerintah saat terjadi lonjakan harga minyak goreng dengan menyediakan stok tambahan, pemerintah dianggap responsif terhadap kenaikan harga komoditas tertentu. Tindakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap kondisi pasar dan dianggap bermanfaat. Namun, tidak semua komoditas mendapatkan respons yang sama. Tindakan serupa tidak selalu diterapkan saat harga sayuran naik akibat berkurangnya pasokan, menunjukkan bahwa makanan yang mudah busuk mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dibandingkan dengan barang pokok.

5. Ketepatan

Untuk ketepatan melalui petugas sering memeriksa lalu mencatat harga langsung dari pedagang di lapangan. Prosedur ini memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan secara akurat mencerminkan kondisi transaksi sebenarnya, menghasilkan data yang dapat dipercaya dan representatif. Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah untuk memutuskan langkah intervensi harga yang tepat. Kebijakan yang dikembangkan memiliki peluang lebih besar untuk tepat sasaran dan sesuai dengan permintaan pasar dengan tingkat ketepatan data ini.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan pemantauan harga dengan menggunakan teori yang berfokus pada lima kriteria yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan pemantauan harga komoditas strategis yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya di Pasar Sememi khususnya oleh Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan untuk kriteria efisiensi, kecukupan, dan ketepatan telah terlaksana dengan baik, terlihat dari bagaimana petugas melakukan tugas rutin pemantauan harga dan mencatat harga tersebut di lapangan sehingga data tersebut diperoleh secara nyata. Untuk kriteria responsivitas dan perataan, meskipun pemerintah responsif terhadap lonjakan harga pada komoditas tertentu

seperti minyak goreng, namun untuk komoditas yang lainnya seperti sayur yang harganya cenderung fluktuatif tidak mendapatkan respon yang sama terhadap hal tersebut. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Wardana, M. (n.d.-a). *Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan di Pasar Genteng Baru.* <https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma>.
<https://doi.org/10.56689/padma.v5i1.2002>
- Desi Aryani. (2021). *View of Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia_ Waktu Efektif yang Dibutuhkan.*
<https://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/538/436>
- Isra, M., Yoanda, A., Syah, A. R., Harahap, A., Jaya, A. P., Daman, H., Lubis, H., Priatama, A., & Simamora, R. (2025). *Analisis Fluktuasi Harga Cabai, Sayur Dan Beras Di Pasar Tradisional : Studi Kasus Di Pasar Raya Mmtc, Deli Serdang.* In *Jurnal Ekonomi Mikro Bisnis Harapan* (Vol. 4).
- Izzul Wafa. (2025, February 7). *Warga RI Keluhkan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Dibanding Tahun Lalu.*
- Jurnal, W., Sekar Sari, A., Aprisilia, N., Fitriani, Y., & Kata Kunci, A. (2025). *Indonesian Research Journal on Education Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi.* In *Indonesian Research Journal on Education* (Vol.5). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.301>
- Kementerian Perdagangan. (2025). *Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Periode Oktober 2025.* https://sp2kp.kemendag.go.id/berita_artikel/view/60
- Kuncoro, D. A., & Nafisa, A. (2025). *Peranan Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang Dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok.* *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 386 395. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.7442>
- Kusnarti, A. (2023). *Ulfah Setia Iswara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.*
- Lokanesia. (2025). *Peta Kecamatan Benowo Surabaya Barat.*
<https://lokanesia.com/peta-kecamatan-benowo-surabaya-barat/>
- Marina, I., Sukmawati, D., Juliana, E., & Safa, Z. N. (2024). *Dinamika Pasar Komoditas Pangan Strategis: Analisis Fluktuasi Harga Dan Produksi.* *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 12(1), 160. <https://doi.org/10.35138/paspalum.v12i1.700>
- Nur, A., Widayanti, S., Cikusin, Y., & Putra, L. R. (2025a). *Efektivitas Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Malang* (Vol. 19, Issue 10).
- Nurrissa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data.* 02, 793 800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>

- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Surabaya Tembus 5,24 Persen, Pasar Tradisional Jadi Penggerak.*
<https://www.surabaya.go.id/id/berita/24227/pertumbuhan-ekonomi-surabaya-tembus-5-24-persen-pasar-tradisional-jadi-penggerak>
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.* Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 6(2), 114–126.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Rahayu, F. S., & Masradin, A. A. (2025). *Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kecamatan Bontomatene Kepulauan Selayar.* KAIZEN: Kajian Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Kewirausahaan, 4(1).
- Subhi, M., Kuncoro, A., Oriza, R., & Umar, G. (2025). *Peran Sistem Pemantauan Harga Bahan Pokok Terhadap Inflasi Harga Oleh Dinas Perindagkop Dan Ukm Kota Pariaman.* Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 1(2).